

# ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTODA DI KABUPATEN NGANJUK

David Efendi

Sri Wuryanti

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo 10, Ponorogo 63471, Jawa Timur

E mail : [davidefendi56@yahoo.co.id](mailto:davidefendi56@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

*Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk untuk tahun anggaran 2005-2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.*

*Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan obyek penelitian PEMDA Kabupaten Nganjuk. Data sekunder yang dibutuhkan adalah APBD TA. 2005-2009. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan: (1) rasio kemandirian, (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal, (3) Rasio indeks kemampuan rutin, (4) rasio keserasian, dan (5) rasio pertumbuhan.*

*Hasil penelitian menunjukkan: (1) rasio kemandirian berstatus rendah sekali, (3) rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, (3) rasio indeks rutin berskala kurang, (4) rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, (5) rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif. Keterbatasan penelitian: hanya menggunakan analisis rasio, tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD.*

Kata Kunci: kemampuan keuangan daerah, otonomi daerah

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Otonomi Daerah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber

dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Akibatnya mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah berubah yaitu diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu sebagian besar proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dulu ditangani dan dibiayai oleh pemerintah pusat sekarang akan menjadi beban pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan menanggung beban belanja atau pengeluaran yang jumlahnya besar. Namun dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya didapat hasil bahwa hampir semua daerah di Indonesia memiliki derajat desentralisasi di bidang perekonomian yang rendah. Menanggapi strategi pembiayaan pembangunan, permasalahan pembangunan termasuk strategi pembiayaannya merupakan permasalahan multidimensi dan berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yulianti (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mengenai perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilakukan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Sukoharjo diperoleh temuan studi: bahwa belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan, kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat selain itu kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo masih belum mandiri karena peranan PAD sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. Di Kabupaten Probolinggo, diperoleh temuan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Probolinggo disektor keuangan masih kurang dan diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dengan mengidentifikasi potensi daerah sebagai peluang baru untuk sumber-sumber penerimaan dapat dicari dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk untuk tahun anggaran 2005-2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yaitu perbedaan kemampuan keuangan daerah. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169), yaitu : (1) pola hubungan instruktif, (2) pola hubungan konsultif, (3) pola hubungan partisipatif, dan (4) pola hubungan delegatif. Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan Kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari : (1) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi: (1) belanja rutin (operasional), adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan menambah asset / kekayaan bagi daerah. (2) belanja pembangunan (belanja modal) adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset / kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. serta (3) pengeluaran tidak disangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran. APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan APBD mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran, yaitu: (Nirzawan, 2001:79): (1) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (2) disiplin anggaran, (3) keadilan anggaran, (4) efisiensi dan efektivitas anggaran, (5) format anggaran

Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan di sektor privat. Adapun rasio-rasio tersebut meliputi:

- (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus rasio tersebut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendanaan APBD Tahun t}}$$

Rasio Kemandirian:

- (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{PAD_t}{TPD_t}$$

$$DDF : \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub>: Total PAD tahun t

TPD<sub>t</sub> : Total Penerimaan Daerah Tahun t

- (3) Rasio indeks kemampuan rutin, yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (Mudrajat,1997). Rumus rasio ini adalah:

$$\frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran Rutin}}$$

IKR :

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

- (4) Rasio keserasian, rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001 : 262) :

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

- (a) Rasio Belanja Rutin :

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

- (b) Rasio Belanja Pembangunan :

- (5) Rasio pertumbuhan, rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

r :

Keterangan :

P<sub>n</sub> : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> : Data yang dihitung pada tahun ke-0

R : Pertumbuhan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Mohamad, 2003: 54). Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nganjuk dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian dengan obyek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2004-2009. Data tersebut diperoleh dengan cara dokumentasi. Data didapatkan dari informasi yang tertuang dalam buku Nganjuk dalam angka dan dari website resmi Dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Rasio kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendanaan dan Pembiayaan}}$$

Rasio kemandirian :

- (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal

$$\frac{PAD_t}{TPD_t}$$

DDF : x 100 %

(3) Rasio indeks kemampuan rutin

$$\frac{PAD}{Total\ Pengeluaran} \times 100\%$$

IKR :

(4) Rasio keserasian

$$\frac{Total\ Belanja\ Rutin}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Rasio Belanja Rutin :

$$\frac{Total\ Belanja\ Pembangunan}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Rasio Belanja Pembangunan :

$$\frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

(5) Rasio pertumbuhan r:

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan [Kabupaten Bojonegoro](#) di utara, [Kabupaten Jombang](#) di timur, [Kabupaten Kediri](#) dan [Kabupaten Ponorogo](#) di selatan, serta [Kabupaten Madiun](#) di barat. Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah 122.433,1 Ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi daerah pemukiman seluas 15.344 ha (12,53%); lahan sawah seluas 43.000 ha (35,2%); tegal seluas 14.432 ha (11,79%); perkebunan seluas 260 ha (0,21%); hutan seluas 47.007 ha (38,39%); dan lainnya seluas 2.395 ha (1,96%).

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2007 sebanyak 1.063.555 jiwa, mengalami pertumbuhan 2,30 % dari tahun 2006 atau sebanyak 20.052 jiwa, dengan perincian 526.337 jiwa penduduk laki-laki dan 537.218 jiwa penduduk perempuan. Sex ratio Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2007 sebesar 97,97% yang berarti bahwa untuk 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2006 disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah kelahiran dan migrasi penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Nganjuk 869 jiwa per km<sup>2</sup>. Persentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjung Anom yaitu 10,55 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluyu, yaitu 168 jiwa per km<sup>2</sup>. (RPJMD Kab.Nganjuk, 2009-2013) Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dari formula yang ada maka diperoleh rasio kemandirian seperti pada tabel 1.

Tabel 1  
Rasio kemandirian kabupaten nganjuk (TA. 2004-2009)

N o	TA	Rasio Kemandirian	Status	Perkembangan dengan tahun sebelumnya
1	2004	9,52%	Rendah sekali	-
2	2005	10,03%	Rendah sekali	Meningkat
3	2006	8,95%	Rendah sekali	Turun
4	2007	8,28%	Rendah sekali	Turun
5	2008	8,13%	Rendah sekali	Turun
6	2009	8,59%	Rendah sekali	Meningkat
	Rata-rata	8,80%	Rendah sekali	

Sumber : Data diolah 2011

### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam tabel 2:

Tabel 2  
Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Nganjuk (TA. 2004-2009)

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2004	35.292.964.002,53	406.160.770.634,00	8,69%	Sangat kurang
2005	38.412.672.135,43	421.453.009.327,43	9,11%	Sangat kurang
2006	52.045.925.054,47	633.428.577.443,24	8,22%	Sangat kurang
2007	54.624.853.919,78	714.450.536.050,55	7,65%	Sangat kurang
2008	58.846.454.316,84	782.602.876.333,84	7,52%	Sangat kurang
2009	71.274.642.864,63	900.976.880.928,63	7,91%	Sangat kurang
	Rata-rata		8,08%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah 2011

### Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat dalam tabel 3:

Tabel 3  
Kontribusi PAD Terhadap Pengeluaran Rutin Kab. Nganjuk (TA. 2004-2009)

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pengeluaran Rutin (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2004	35.292.964.002,53	270.021.056.493,00	13,07%	Sangat kurang
2005	38.412.672.135,43	264.225.093.061,00	14,54%	Sangat kurang
2006	52.045.925.054,47	317.711.314.025,00	16,38%	Sangat kurang
2007	54.624.853.919,78	383.636.318.267,00	14,24%	Sangat kurang
2008	58.846.454.316,84	535.327.687.740,00	10,99%	Sangat kurang
2009	71.274.642.864,63	581.028.758.776,73	12,27%	Sangat kurang
	Rata-rata		13,58%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah 2011

### Rasio Keserasian

Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam tabel 4 dan tabel 5:

Tabel 4  
Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kab. Nganjuk (Ta. 2004-2009)

No	Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Rutin	Rasio
----	-------	---------------	-------------------------	-------

	Anggaran	(Rp)	Rp.	Perkem bangan	Belanja Rutin
1	2004	383.403.597.872,50	270.021.056.493,00	-	70,43%
2	2005	417.963.056.292,00	264.225.093.061,00	-2,15%	63,22%
3	2006	593.878.942.381,00	317.711.314.025,00	20,24%	53,50%
4	2007	695.318.007.001,00	383.636.318.267,00	20,75%	55,17%
5	2008	794.269.647.364,00	535.327.687.740,00	39,54%	67,40%
6	2009	907.476.122.197,68	581.028.758.776,73	8,54%	64,03%

Sumber : Data diolah 2011

Tabel 5  
Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kab. Nganjuk (Ta. 2004-2009)

No	Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Pembangunan Rp.	Perkem bangan	Rasio Belanja Pembang unan
1	2004	383.403.597.872,50	113.382.541.379,50	-	29,57%
2	2005	417.963.056.292,00	153.737.963.231,00	35,59%	36,78%
3	2006	593.878.942.381,00	276.167.628.356,00	79,64%	46,50%
4	2007	695.318.007.001,00	311.681.688.734,00	12,86%	44,83%
5	2008	794.269.647.364,00	258.941.959.624,00	-16,92%	32,60%
6	2009	907.476.122.197,68	326.447.363.420,95	26,07%	35,97%

Sumber : Data diolah 2011

### Rasio Pertumbuhan

Hasil rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6  
Perhitungan Rasio pertumbuhan Kab. Nganjuk (Ta. 2004-2009)

NO	Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	PAD	35.292.964.002, 53	38.412.672.135, 43	52.045.925.054, 47	54.624.853.919, 78	58.846.454.316, 84	71.274.642.864, 63
2	Pertumb. PAD	-	8,84%	35,49%	4,96%	7,73%	21,12%
3	TPD	406.160.770.63 4,00	421.453.009.32 7,43	633.428.577.44 3,24	714.450.536.05 0,55	782.602.876.33 3,84	900.976.880.92 8,63
4	Pertumbuhan TPD	-	3,77%	50,30%	12,79%	9,54%	15,13%
5	Belanja pembangunan	113.382.541.37 9,50	153.737.963.231, 00	276.167.628.356, 00	311.681.688.734, 00	258.941.959.624, 00	326.447.363.420, 95
6	Pertumbuhan Belanja pembangunan	-	35,59%	79,64%	12,86%	-16,92%	26,07%
7	Belanja Rutin	270.021.056.49 3,00	264.225.093.061, 00	317.711.314.025, 00	383.636.318.267, 00	535.327.687.740, 00	581.028.758.776, 73
8	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	-2,15%	20,24%	20,75%	39,54%	8,54%

Sumber: Data diolah, 2011



## **Kesimpulan**

Dari rasio yang digunakan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki rata-rata diantara 0 %-25 % yaitu sebesar 8,80%. Artinya angka tersebut memiliki status rendah sekali.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama enam tahun memiliki rata-rata sebesar 8,08%. hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih sangat kurang.
3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama enam tahun pada pemerintah Kabupaten Nganjuk masuk dalam skala yang sangat kurang, karena berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 13,58%.
4. Berdasarkan rasio keserasian, diketahui bahwa rasio belanja rutin selalu lebih besar daripada rasio belanja pembangunan. Artinya sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin atau belanja tidak langsung sehingga rasio belanja pembangunan atau belanja langsung relatif kecil.
5. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, selama periode penelitian terjadi pertumbuhan positif sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2005,2006 dan 2009. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 terjadi pertumbuhan yang negatif.

## **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi.
2. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, menyiapkan sistem administrasi dan komputerisasi dalam pemungutan pajak dan restribusi daerah.
3. Memacu pengembangan BUMD yang dapat meningkatkan PAD.

## **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan model analisis rasio keuangan lainnya sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
2. Penelitian ini tidak dapat menganalisis keseluruhan unsur perkembangan APBD, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta UPP YKPN  
\_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.

- \_\_\_\_\_. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Anata Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 5 No. 2. November*
- BPS. 2009. *Nganjuk Dalam Angka 2009*. BPS Nganjuk
- \_\_\_\_\_. 2010. *Nganjuk Dalam Angka 2010*. BPS Nganjuk
- <http://www.Nganjukkab.go.id>
- Abdul Halim dan Syukri Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja PEMDA: Studi Kasus Kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No. 2 Tahun XIII/25*.
- Muhammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Mudrajat Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah-Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP YKPN.
- Natahiddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN.
- Pemkab Nganjuk. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-201*
- Peraturan Pemerintah RI No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN./